

## **Pengaruh Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Pola Perilaku Keuangan Keluarga Penerima Manfaat**

**Nooraida Fitria, Muslih Amberi**

Program Studi Magister Administrasi Pembangunan, Universitas Lambung Mangkurat  
[noraidafitria1313@gmail.com](mailto:noraidafitria1313@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan didasarkan atas paradigma positivisme yang bersifat *logico-hypotheco-verivicatif*. Tipe penelitian ini bersifat eksplanatif-asosiatif yakni menganalisis perubahan dan mekanisme bantuan sosial dengan pola perilaku keuangan keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyaluran bantuan sosial secara tunai masih terdapat kekurangan dimana memerlukan waktu dan biaya, penerima manfaat belum terhubung dengan sektor keuangan, dan memicu perilaku konsumtif/belum ada usaha budaya menyimpan/menabung, maka dari itu penyaluran bantuan sosial secara non tunai bertujuan untuk mengurangi risiko *moral hazard* lebih kecil, meningkatkan efisiensi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, peningkatan inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan formal bagi jutaan masyarakat miskin penerima bantuan dengan nama Program Nasional Keuangan Inklusif (PNKI).

**Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga, Penerima Manfaat (KPM), Tunai, Non Tunai, Bantuan Sosial

### **Influence of Changes in Social Assistance Distribution Mechanisms for Family Hope Program on the Pattern of Financial Behavior of Beneficiary Families**

### **ABSTRACT**

The approach used in this research is a quantitative approach and is based on the logico-hypotheco-verivicative paradigm of positivism. This type of research is explanative-associative, namely analyzing changes and social assistance mechanisms with family financial behavior patterns. The results of this study indicate that the distribution of social assistance in cash still lacks where it requires time and cost, the beneficiaries are not connected to the financial sector, and triggers consumptive behavior / there is no cultural effort to save / save, therefore the distribution of non-cash social assistance aims to reduce the risk of smaller moral hazards, increase efficiency, transparency and accountability in the distribution of aid, increase financial inclusion by providing formal financial access for millions of poor beneficiaries under the name of the National Program for Inclusive Finance (PNKI).

**Keywords:** Family Hope Program (PKH), Beneficiary Families (KPM), Cash, Non-Cash, Social Assistance

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan program bantuan bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan diharapkan sebagai sarana untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan cara meningkatkan investasi untuk anak-anak keluarga miskin dan rentan miskin dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan kriteria penerima PKH memiliki komponen kesehatan yaitu ibu hamil/menyusui dan anak usia 0 sampai 6 tahun, komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah (wajib belajar 12 tahun), dan komponen kesejahteraan sosial yaitu lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berat. PKH merupakan refleksi system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin, serta sebagai upaya memotong mata rantai miskin.

Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang dijadikan lokasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Di Kalimantan Selatan Program Keluarga Harapan dilaksanakan sejak tahun 2008, di 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten

Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tanah Laut. Sejak awal diberikannya Bantuan PKH, penyaluran bantuan disalurkan secara tunai melalui PT.Pos Indonesia. Tahun 2017 dilakukan perubahan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara non tunai melalui lembaga perbankan yang terhimpun dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) terdiri dari BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri. Penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai merupakan implementasi dari Gerakan Nasional Non Tunai dan mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai memberikan dampak positif yaitu meningkatkan perilaku menabung bagi penerima manfaat, memupuk asset dan mengelola keuangan KPM seperti salah satu contoh KPM ibu Diana Kusnarti. Uang bantuan PKH digunakan untuk biaya sekolah. Uang yang tadinya untuk biaya sekolah ditabung sedikit demi sedikit untuk modal usaha. Sekarang Ibu Diana Kusnarti telah keluar dari kepesertaan PKH secara sukarela sebagai bentuk kesadaran diri dari KPM PKH yang sudah sejahtera atau mandiri secara ekonomi dengan istilah graduasi mandiri. KPM graduasi mandiri di Kota Banjarbaru memang belum banyak,

tetapi sudah menunjukkan adanya pemberdayaan sejak penyaluran Bantuan PKH secara non tunai mulai tahun 2017. Kecamatan Cempaka terdapat lebih banyak KPM yang telah graduasi mandiri setelah perubahan penyaluran bantuan PKH secara non tunai. Untuk itu peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, maka dalam penelitian ini hanya ditentukan beberapa variabel saja, yaitu pengaruh mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH yang semula tunai menjadi non tunai di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.

### Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, tipe penelitian ini bersifat eksplanatif-asosiatif.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau wilayah penelitian ini adalah Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan lokasi penyebaran bantuan sosial non tunai PKH.

### Jenis dan Sumber Data

Data sekunder adalah data penunjang atau pelengkap data primer. Data ini berupa profil Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan data Penrima Manfaat Bantuan Sosial Non Tunai PKH yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti : dokumen, arsip, dan laporan-laporan kegiatan lainnya yang relevan dan tersedia di Kecamatan Cempaka.

### Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2002:62) bahwa “pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara.

### Populasi Dan Sampel Penelitian

#### Populasi

Karena subjek dan unit analisis penelitian ini adalah warga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cempaka, maka seluruh warga di kawasan tersebut menjadi populasi penelitian. Sesuai data sekunder yang diperoleh, jumlah keluarga penerima bantuan adalah sebanyak 2128 orang di Kecamatan Cempaka sesuai dengan data penyaluran bantuan tahap II tahun 2019. Mengingat jumlah populasi ini cukup

terbatas, maka seluruh keluarga penerima bantuan di Kecamatan Cempaka menjadi responden penelitian.

### **Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah 30 responden Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Non Tunai PKH di kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Pengujian Hipotesis dan Uji Regresi Sederhana**

Untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Pola Perilaku Keuangan Keluarga di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru didapatkan kontribusinya  $R^2$  (r<sup>2</sup>) sebesar 0,025. Nilai  $R^2$  dapat digunakan untuk menganalisa hasil Koefisien Determinasi (KD), dimana nilainya di dapat dari rumus ( $KD = r^2 \times 100\%$ ) maka,  $0,025 \times 100\% = 2,5 \%$  artinya Pengaruh Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Pola Perilaku Keuangan Keluarga di

Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dari Tunai menjadi Nontunai mempunyai kontribusi sebesar 97.5%. hal itu dikarenakan 2.5% nya adalah sisa dari beberapa responden dari seluruh Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang masih belum mengerti dan belum mendapatkan pengaruh dari perubahan mekanisme bantuan sosial PKH akibat dari faktor lainnya diluar penelitian ini.

Selain itu untuk menganalisa perhitungan regresi linear maka penulis menghitungnya secara manual dengan ketentuan rumus dibawah ini:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Untuk mendapatkan nilai Y maka penulis mencari nilai a dan nilai b terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan program SPSS.

Untuk mendapatkan nilai Y maka nilai (a) dan nilai (b) yang telah diketahui hasilnya, disatukan kedalam rumus regresi linear sederhana berikut ini:

$$Y = 4.926 + 0,259 X$$

Selain itu persamaan regresi (4.926 + 0,259 X) dapat di interpretasikan bahwa setiap perubahan Pengaruh Perubahan

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Pola Perilaku Keuangan Keluarga di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dari Tunai menjadi Nontunai maka akan terjadi peningkatan sebesar 0,259 satuan perubahan perilaku keuangan dikalangan masyarakat penerima dana PKH sejalan dengan konstanta 4.926.

Sedangkan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh dari variabel X (Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH) dengan variabel Y (Pola Perilaku Keuangan Keluarga), maka penulis menggunakan analisa melalui uji t.

Hasil perhitungan thitung didapat sebesar 8.307 lebih besar dari ttabel dengan  $n=76$  dan  $df$  5% (0,05) diperoleh ttabel sebesar 1,991. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap variabel Y.

Hasil analisa menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (X) Terhadap Pola Perilaku Keuangan Keluarga

di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dari Tunai menjadi Nontunai (Y)

## **Pembahasan**

### **Program Keluarga Harapan Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru berjalan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada setiap pertemuan antara pendamping dengan penerima dana PKH akan senantiasa mendengar keluhan dari Keluarga Penerima Manfaat seputar bantuan PKH ataupun masalah pendidikan dan kesehatan jika mereka memiliki kendala yang kemudian keluhan itu akan dikemukakan dalam rapat di UPPKH Kota untuk dapat ditindaklanjuti dan diberikan solusi. Hal-hal tersebut ternyata juga dilaksanakan dengan baik oleh para pendamping PKH di Kecamatan Cempaka.

Selain itu Seluruh pendamping PKH memiliki tugas yang sangat penting sebagai pelaksana PKH yang paling dekat dengan masyarakat. Setiap bulan para pendamping harus melakukan pertemuan rutin dengan para Keluarga Penerima Manfaat. Perubahan perilaku yang berada di

kelurahan kelurahan dalam tahap 3 cukup signifikan.

Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan intervensi terhadap perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat dan mengontrol mereka agar bantuan benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya, karena perlunya Monitoring serta Evaluasi agar bisa dilihat perubahan dari Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dari yang awalnya Tunai menjadi Non Tunai

Selain itu para pendamping sudah melakukan sosialisasi dengan Memberikan modul untuk agenda Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Hal ini dilakukan karena kewajiban serta demi kesuksesan perubahan non tunai ke tunai itu sendiri.

### **Penerapan Teori S-O-R**

Sebagai landasan dari penelitian ini, digunakan teori stimulus organism respon. Teori ini menjelaskan pengaruh yang terjadi pada pihak penerima sebagai akibat dari komunikasi. Besar kecilnya pengaruh serta dalam bentuk apa pengaruh itu terjadi, tergantung pada isi penyajian stimulus. Stimulus dalam penelitian ini yakni

Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH Terhadap Pola Perilaku Keuangan Keluarga di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dari Tunai menjadi Nontunai. Dalam mekanisme ini pasti ada intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. Salah satunya adalah adanya pertemuan kelompok P2K2 dimana ada kartu kendali dari pendamping kepada penerima dana PKH untuk monitoring dan evaluasi yang terdiri dari lima modul pertemuan peningkatan kemampuan keluarga rutin setiap bulan oleh pendamping. Agenda ini wajib dilaksanakan karena adanya beberapa sumber atribut pendukung (*sources attributes*) yang menjadi pertimbangan dalam memilih Metode Bantuan Non Tunai sebagai Pilihan Utama Perilaku Keuangan.

Dalam proses perubahan perilaku keuangan yang mempengaruhi diantaranya adalah inklusif keuangan. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai bertujuan untuk mengurangi risiko moral hazard lebih kecil, meningkatkan efisiensi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, peningkatan inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan formal bagi jutaan masyarakat miskin

penerima bantuan (Program Nasional Keuangan Inklusif) dengan keuntungan penerima manfaat tidak harus menarik seluruh bantuan yang diterima sehingga terdapat insentif bagi penerima untuk menyimpan/dapat meningkatkan perilaku menabung bagi penerima manfaat, memupuk asset dan mengelola keuangan dan mempermudah integrasi bantuan sosial dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Pada dasarnya prinsip keuangan inklusif menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 yakni poin Kepemimpinan (leadership), Keragaman (diversity), Inovasi (Innovation), Perlindungan (Protection), Pemberdayaan (Empowerment), Kerjasama (Cooperation), Pengetahuan (knowledge), Proporsionalitas (proportionality), serta Kerangka kerja (framework). Program PKH di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dikoordinasikan oleh Koordinator Kota, dibawah oleh Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan, dan pimpinan tertinggi adalah Kordinator Regional Pulau Kalimantan. Sehingga inklusif keuangan jika dilihat dari teori Stimulus Organism Respon,

monitoring serta evaluasinya sudah jelas runtutannya dari atas ke bawah.

### **Pola Perilaku Keuangan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH dari Bantuan Tunai menjadi Non Tunai**

. Pengetahuan keuangan dapat diperoleh dari pendidikan formal dan sumber-sumber informal. Pendidikan formal ini seperti program sekolah tinggi atau kuliah, seminar, dan kelas pelatihan di luar sekolah. Sedangkan sumber-sumber informal dapat diperoleh dari lingkungan sekitar, seperti dari orang tua, teman, dan rekan kerja, maupun yang berasal dari pengalaman sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan transmisi pengetahuan, kepercayaan, dan informasi sehingga menimbulkan pembentukan sikap yang diawali oleh Attention (perhatian), Interest (minat), Desire (keinginan), Conviction (keyakinan), dan diakhiri oleh Action (tindakan).

Dalam hal ini ada tantangan terbaru adalah *digitalisasi* dimana bantuan yang pada awalnya adalah Tunai, mulai awal penyaluran tahun 2018 sudah menjadi bantuan secara non tunai yakni melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sehingga

menjadi tantangan besar untuk pendamping PKH serta Keluarga Penerima Manfaat PKH yang umumnya adalah masyarakat yang masih belum melek teknologi. Namun dari hasil penelitian menyebutkan bahwa pola perilaku keuangan keluarga para keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH justru lebih bagus dengan perubahan bantuan PKH yang awalnya tunai menjadi non tunai

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Di Kecamatan Cempaka sendiri telah menunjukkan bahwa masyarakatnya mengalami peningkatan terhadap kepeduliannya di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan-nya terutama setelah program PKH ini mekanismenya berubah dari tunai menjadi nontunai. Mekanisme bantuan sosial PKH di Kota Banjarbaru sendiri khususnya di Kecamatan Cempaka yang jumlah Penerima Manfaatnya lebih banyak daripada kecamatan-kecamatan lain di Kota Banjarbaru sudah cukup maksimal. Jika ditelusuri terutama bantuan sosial PKH ini dari tunai menjadi nontunai membuat pola perilaku keuangan Keluarga Penerima

Manfaat menjadi lebih baik karena warga penerima bantuan sosial jadi lebih bisa menabung dan lebih efektif dalam menggunakan dana bantuannya, hal ini berkat pendamping PKH yang memang harus lebih giat dalam mensosialisasi dan mendampingi keluarga penerima bantuan sosial PKH. Selain itu perhatian dari Pemerintah Kota serta Dinas Sosial Kota Banjarbaru harus terus ditingkatkan karena walaupun sampai penyaluran tahap 3 tahun 2019 ini sudah cukup efektif, perlunya garansi jangka panjang agar diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya karena bantuan sosial secara nontunai adalah hal baru bagi program PKH ini.

Selain itu ada tantangan yang perlu diperhatikan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru yakni *digitalisasi* dimana bantuan yang pada awalnya adalah Tunai, mulai awal penyaluran tahun 2018 sudah menjadi bantuan secara non tunai yakni melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sehingga menjadi tantangan besar untuk pendamping PKH serta Keluarga Penerima Manfaat PKH yang umumnya adalah masyarakat yang masih belum melek teknologi. Namun dari hasil penelitian menyebutkan bahwa pola perilaku

keuangan keluarga para keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH justru lebih bagus dengan perubahan bantuan PKH yang awalnya tunai menjadi non tunai karena keluarga penerima bantuan lebih cenderung bisa berhemat.

### **Saran**

Penulis dapat memberikan saran yang dirasa perlu untuk disampaikan, sebagaimana berikut:

1. Penulis menyarankan agar peran pendamping PKH di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru terkait dengan pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi, yakni dengan mempersiapkan pendamping yang lebih aktif dan inisiatif sehingga pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang lebih baik yaitu dengan berkurangnya jumlah penerima manfaat atau Keluarga Penerima Manfaat dapat keluar dari program dan menjadi sejahtera mandiri.
2. Keberhasilan Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ada dalam peranan pendamping dan Pemerintah Daerah, dalam menjalankan tugas hendaknya tanpa pamrih, berani

berkorban meluangkan waktu, pemikirannya, baik dalam situasi dan kondisi lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif. Karena peranan Pemerintah Daerah selalu menjadi persoalan penting yang akan memberikan motivasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak baik bagi generasi berikutnya serta koordinasi dan respon dari instansi terkait terutama dalam hal kegiatan pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat.

3. Penelitian selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang di implementasikan pemerintah yang telah dilaksanakan secara non tunai, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Aquinas. Thomas “*Kemensos Paparkan Strategi Program SDGs Dalam Forum ADB Jepang*” dalam <https://m.trubus.id> diakses tanggal 12 Agustus 2018
- Chinen, Kenichiro & Hideki Endo, *Effect of Attitude and Background on Personal Finance Ability: A Study*

- Survey in the United State. International Journey of Management.* (29).1:33-45.2012
- Khomsan Ali, dkk (2015), *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta : Kerjasama Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Yayasan Pustaka Obor Miskin Indonesia
- Moleong, Lexy (2000), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya (cetakan kesebelas)
- Pujileksono, Sugengi, Wira Wuryantari, (2017), *Implementasi Teori Teknik Dan Prinsip Pekerjaan Sosial: Malang* : Intrans Publishing
- Sahib, Munawwarah (2016), *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Baje Kota Banjarbaru* : Universitas Islam Negeri Alauddin. Makasar
- Sarman, Mukhtar (2004), *Metodologi Penelitian Sosial*, Banjarmasin : Pustaka Fisip Unlam
- Sarman, Mukhtar (2016), *Paradigma Penelitian Pilihan-Pilihan Pendekatan*, Yogyakarta : LKiS Printing Cemerlang
- Soekanto, Soerjono (1988), *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Suharto, Edi, Juni Thamrin, Michael Cuddy dan Eammon Moran (2006), *Strengthening Social Protection System in ASEAN, Galwayc: GDSI*
- Suharto, Edi (2013), *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta (cetakan keempat)
- Suharto, Edi (2013), *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung : Alfabeta (cetakan kedua)
- Suharto, Edi (2015), *Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia*, Sosiohumaniora. Jurnal of Social Sciences and Humanity
- Suparlan, D.P (1984), *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta : Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia
- Sitomorang. Chazali H”CCT dan PKH Samakah?” dalam [www.journalsocialsecurity.com](http://www.journalsocialsecurity.com) diakses tanggal 12 Agustus 2018
- T.K.Hira, O M.Mugenda.*The relationship between self-worth and financial beliefs, behavior, and satisfaction. Journal of Family and consumer Sciences*, 91(4)(1999) 76-82
- Non Buku**
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Profil Kota Banjarbaru 2017-2021 <http://pakarkomunikasi.com/teori-sor>